

Geography-Based Budget Allocation for Digital Transformation of SMTK in Maluku 3T

Alokasi Anggaran Berbasis Geografis untuk Transformasi Digital SMTK di Wilayah 3T Maluku

Author's Name* : Lulu bin Tahir Achmad
Institution/University : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku
Correspondence Author's E-mail : loeloe.cantik@gmail.com

Article History	Received (March 9 th , 2026)	Revised (April 5 th , 2026)	Accepted (May 26 th , 2026)
-----------------	--	---	---

News Article

Keyword:

Budget Allocation;
Geographical Weighting;
Digital Transformation;
Disadvantaged Regions;
Education Policy.

Abstract

Digital transformation in religious secondary education is a strategic component of national education reform aimed at strengthening governance, accountability, and service quality. However, the implementation of digital transformation in Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) located in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) areas of Maluku Province still faces structural constraints, particularly related to infrastructure availability and the design of budget allocation mechanisms. This study aims to analyze the problem of facilities and infrastructure budget allocation that has not yet been based on geographical needs and to examine its implications for the effectiveness of digital transformation. The study applies a qualitative policy analysis approach through document analysis using the perspectives of distributive justice, needs-based budgeting, and affirmative regional policy. The results indicate that the current allocation mechanism still relies on a uniform national formula and does not incorporate geographical weighting parameters or indicators of digital inequality. Consequently, resource distribution has not been fully responsive to the characteristics of 3T regions, resulting in limited institutional readiness and widening disparities in digital infrastructure support. This paper therefore recommends reformulating the budget allocation mechanism by integrating geographical weighting coefficients and digital infrastructure indicators into the funding formula to enhance proportionality in resource distribution and strengthen digital transformation in religious secondary education institutions in Maluku Province.

Kata Kunci:

Alokasi Anggaran;
Pembobotan Geografis;
Transformasi Digital;
Wilayah 3T;
Kebijakan Pendidikan.

Abstrak

Transformasi digital dalam pendidikan menengah keagamaan merupakan bagian strategis dari agenda reformasi pendidikan nasional yang bertujuan memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan mutu layanan pendidikan. Namun demikian, implementasi transformasi digital pada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Provinsi Maluku masih menghadapi kendala struktural, terutama terkait keterbatasan infrastruktur digital serta desain mekanisme alokasi anggaran. Kajian ini bertujuan menganalisis permasalahan alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana yang belum berbasis kebutuhan geografis serta

implikasinya terhadap efektivitas transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif melalui studi dokumen dengan menggunakan perspektif keadilan distributif, needs-based budgeting, dan kebijakan afirmatif wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme alokasi yang berlaku masih menggunakan formula nasional yang seragam dan belum mengintegrasikan parameter pembobotan geografis maupun indikator kesenjangan digital dalam perhitungan besaran bantuan. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi sumber daya belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik wilayah 3T sehingga kesiapan kelembagaan menjadi terbatas dan kesenjangan dukungan infrastruktur digital semakin melebar. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan reformulasi mekanisme alokasi anggaran melalui integrasi koefisien pembobotan geografis serta indikator kebutuhan infrastruktur digital dalam formula pendanaan guna meningkatkan proporsionalitas distribusi anggaran dan memperkuat implementasi transformasi digital pendidikan menengah keagamaan di Provinsi Maluku.

To cite this article: Lulu bin Tahir Achmad. (2026). "Geography-Based Budget Allocation for Digital Transformation of SMTK in Maluku 3T". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 2(1), Page: 641 – 654.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Transformasi digital dalam sektor pendidikan merupakan bagian penting dari agenda reformasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup perubahan dalam sistem pengelolaan data, mekanisme pelaporan, proses pembelajaran, serta integrasi layanan pendidikan secara nasional. Dalam konteks pendidikan keagamaan, transformasi digital memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi pengelolaan, akurasi data kelembagaan, serta peningkatan mutu proses pembelajaran.

Transformasi digital dalam sektor pendidikan juga menjadi agenda global dalam peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya melalui pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses pembelajaran dan memperkuat sistem tata kelola pendidikan (UNESCO, 2023).

Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) sebagai bagian dari satuan pendidikan keagamaan berada dalam kerangka kebijakan nasional yang mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola pendidikan. Implementasi berbagai sistem berbasis teknologi informasi menuntut kesiapan infrastruktur digital, ketersediaan perangkat pendukung, serta akses jaringan yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, transformasi digital berpotensi berjalan secara administratif semata tanpa menghasilkan peningkatan kualitas layanan pendidikan secara substantif.

Namun demikian, implementasi transformasi digital pada SMTK di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Provinsi Maluku masih menghadapi berbagai kendala struktural. Karakteristik geografis wilayah kepulauan yang tersebar, keterbatasan akses transportasi, serta tingginya biaya distribusi logistik menyebabkan penyediaan sarana

dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur digital, menjadi lebih kompleks dibandingkan wilayah non-3T.

Di sisi lain, mekanisme alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana pendidikan masih cenderung menggunakan pendekatan yang seragam secara nasional. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan karakteristik geografis serta tingkat kesulitan wilayah. Akibatnya, nominal bantuan yang sama dapat menghasilkan daya beli riil yang berbeda antara wilayah yang memiliki akses infrastruktur memadai dan wilayah kepulauan dengan hambatan logistik yang tinggi.

Dalam konteks Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan, kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam efektivitas implementasi transformasi digital antarwilayah. Satuan pendidikan di wilayah 3T menghadapi keterbatasan dalam penyediaan perangkat teknologi, akses jaringan internet, serta dukungan infrastruktur digital lainnya. Hal tersebut berimplikasi pada kesiapan kelembagaan dalam mengimplementasikan berbagai sistem digital yang menjadi bagian dari kebijakan nasional pendidikan.

Dengan demikian, permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga menyangkut desain mekanisme distribusi anggaran yang belum sepenuhnya sensitif terhadap karakteristik geografis wilayah. Apabila mekanisme alokasi anggaran tetap menggunakan pendekatan yang seragam tanpa mempertimbangkan tingkat kesulitan wilayah, maka kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pemerataan layanan pendidikan berpotensi menghasilkan dampak yang tidak proporsional.

Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengkaji kesenjangan antara desain alokasi anggaran yang berlaku saat ini dengan kebutuhan riil satuan pendidikan di wilayah 3T. Analisis ini penting untuk merumuskan alternatif kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik geografis wilayah serta mampu memperkuat efektivitas transformasi digital dalam pendidikan menengah keagamaan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

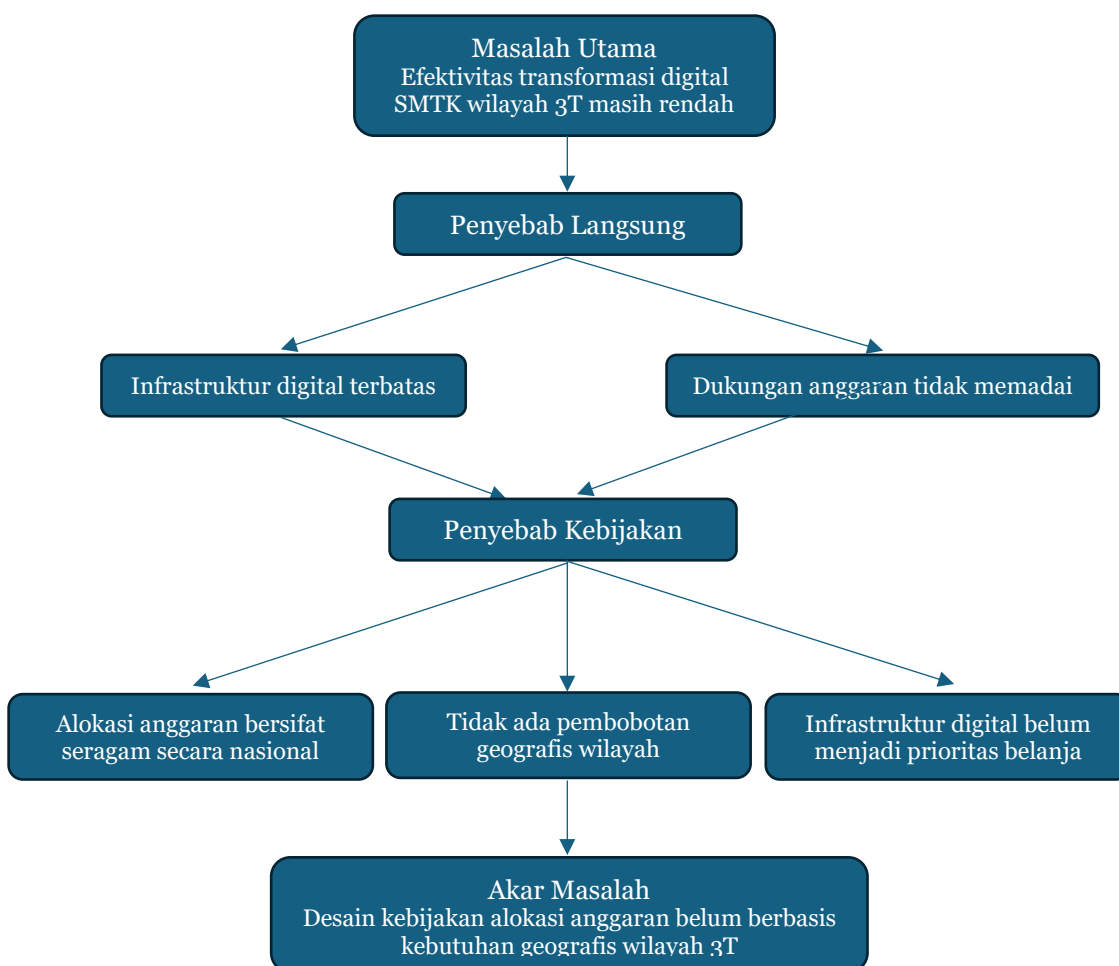
1. Rendahnya ketersediaan dan akses infrastruktur digital pada SMTK di wilayah 3T Provinsi Maluku.
2. Transformasi digital belum menjadi prioritas dalam struktur belanja bantuan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan.
3. Mekanisme alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana belum berbasis kebutuhan geografis wilayah 3T.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan utama dalam kajian ini adalah belum optimalnya efektivitas transformasi digital pada SMTK di wilayah 3T Provinsi Maluku. Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab yang saling berkaitan.

Dari hasil analisis kebijakan, penyebab utama dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor utama. *Pertama*, mekanisme distribusi anggaran bantuan sarana dan prasarana masih menggunakan pendekatan yang seragam secara nasional tanpa mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah. Pendekatan ini menyebabkan nominal bantuan yang diterima oleh satuan pendidikan di wilayah 3T tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. *Kedua*, belum terdapat parameter pembobotan geografis

dalam formula alokasi anggaran. Ketiadaan faktor koreksi wilayah menyebabkan perbedaan tingkat kesulitan geografis, biaya logistik, dan hambatan distribusi tidak tercermin dalam perhitungan besaran bantuan. *Ketiga*, infrastruktur digital belum sepenuhnya diposisikan sebagai komponen prioritas dalam struktur belanja sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. Dominasi belanja fisik non-digital menyebabkan dukungan terhadap transformasi digital belum optimal.

Berdasarkan hubungan sebab-akibat tersebut, akar permasalahan dapat ditelusuri pada desain mekanisme alokasi anggaran yang belum mengintegrasikan pendekatan berbasis karakteristik geografis dan kesenjangan digital wilayah. Kondisi ini menyebabkan distribusi sumber daya belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan satuan pendidikan di wilayah 3T, sebagaimana diilustrasikan dalam pohon masalah berikut ini.



Gambar 1. Pohon Masalah

Berdasarkan analisis pohon masalah pada Gambar 1, rendahnya efektivitas transformasi digital pada SMTK di wilayah 3T dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur digital dan dukungan anggaran yang belum memadai. Kondisi tersebut berkaitan dengan desain mekanisme alokasi anggaran yang masih menggunakan pendekatan seragam secara nasional tanpa mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah.

Setelah akar permasalahan diidentifikasi melalui analisis pohon masalah, tahap selanjutnya adalah menentukan permasalahan yang paling prioritas untuk dianalisis lebih lanjut. Penentuan prioritas masalah dilakukan menggunakan metode USG

(Urgency, Seriousness, Growth). Metode ini digunakan untuk menilai tingkat urgensi suatu masalah, tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan, serta potensi perkembangan masalah apabila tidak segera ditangani.

Melalui pendekatan ini, setiap permasalahan dinilai berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu urgency (tingkat mendesak), seriousness (tingkat dampak), dan growth (potensi perkembangan masalah). Hasil penilaian kemudian digunakan untuk menentukan permasalahan yang paling strategis untuk menjadi fokus analisis kebijakan.

Tabel 1. Analisis Urgency, Seriousness, dan Growth (USG)

No	Daftar Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai
1	Rendahnya ketersediaan infrastruktur digital pada SMTK wilayah 3T	4	4	4	12
2	Transformasi digital belum menjadi prioritas belanja sarana prasarana	4	4	3	11
3	Alokasi anggaran sarana prasarana belum berbasis kebutuhan geografis wilayah 3T	5	5	4	14

Berdasarkan hasil analisis USG pada Tabel 1, permasalahan alokasi anggaran sarana dan prasarana yang belum berbasis kebutuhan geografis wilayah 3T memperoleh nilai tertinggi dibandingkan permasalahan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut memiliki tingkat urgensi yang tinggi, berdampak serius terhadap efektivitas transformasi digital, serta berpotensi berkembang apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, permasalahan tersebut ditetapkan sebagai fokus utama dalam analisis kebijakan pada kajian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil USG di atas, maka permasalahan utama yang menjadi fokus kajian ini adalah belum optimalnya efektivitas implementasi transformasi digital pada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Provinsi Maluku. Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur digital pada satuan pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan desain kebijakan alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana yang masih menggunakan pendekatan seragam secara nasional. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah kepulauan serta tingkat kesulitan akses yang dihadapi oleh satuan pendidikan di wilayah 3T. Tingginya biaya logistik, keterbatasan akses transportasi, serta perbedaan kondisi geografis menyebabkan daya beli riil bantuan di wilayah 3T menjadi lebih rendah dibandingkan wilayah non-3T. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya penyediaan infrastruktur digital yang diperlukan untuk mendukung implementasi berbagai sistem digital dalam tata kelola pendidikan.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis permasalahan alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang belum berbasis kebutuhan geografis wilayah 3T pada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) di Provinsi Maluku.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor kebijakan yang mempengaruhi keterbatasan dukungan infrastruktur digital dalam mendukung implementasi transformasi digital pada SMTK di wilayah 3T.
3. Merumuskan alternatif kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik geografis wilayah dalam mekanisme alokasi anggaran guna mendukung efektivitas transformasi digital pada SMTK di Provinsi Maluku.

Manfaat Kajian:

1. Manfaat Akademik. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang analisis kebijakan publik, khususnya terkait penganggaran pendidikan berbasis kebutuhan wilayah serta implementasi transformasi digital dalam pendidikan keagamaan.
2. Manfaat Praktis. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap karakteristik geografis wilayah, khususnya dalam mendukung transformasi digital pada SMTK di wilayah 3T Provinsi Maluku.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

Keadilan Distributif dalam Kebijakan Publik

Dalam analisis kebijakan publik, prinsip keadilan distributif menjadi salah satu landasan penting dalam menentukan bagaimana sumber daya publik didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Keadilan distributif menekankan bahwa distribusi sumber daya tidak selalu harus dilakukan secara sama rata, tetapi harus mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, kondisi, serta tingkat kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok atau wilayah.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, prinsip keadilan distributif mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan kesenjangan geografis, keterbatasan akses, serta kondisi sosial ekonomi wilayah dalam proses pengalokasian anggaran pendidikan. Dengan demikian, distribusi anggaran tidak hanya bertujuan mencapai kesetaraan nominal, tetapi juga memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan yang proporsional untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Bagi wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku, penerapan prinsip keadilan distributif menjadi sangat penting karena kondisi geografis yang tersebar serta tingginya biaya distribusi logistik menyebabkan kebutuhan pembiayaan pendidikan menjadi berbeda dibandingkan wilayah lainnya.

Needs-Based Budgeting dalam Penganggaran Pendidikan

Needs-based budgeting merupakan pendekatan penganggaran yang menekankan bahwa alokasi sumber daya publik seharusnya didasarkan pada tingkat kebutuhan riil penerima manfaat. Pendekatan ini menekankan bahwa distribusi anggaran tidak semata-mata didasarkan pada formula yang seragam, tetapi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan suatu wilayah atau kelompok tertentu.

Dalam sektor pendidikan, pendekatan needs-based budgeting sering digunakan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dapat mengakomodasi kesenjangan antarwilayah, terutama terkait akses pendidikan, ketersediaan infrastruktur, serta kualitas layanan pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemerintah dapat merancang mekanisme alokasi anggaran yang lebih responsif terhadap kondisi lokal sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam konteks transformasi digital pendidikan, pendekatan ini menjadi relevan karena kesiapan infrastruktur digital antarwilayah sangat berbeda. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan riil wilayah menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan digital antar satuan pendidikan.

Kebijakan Afirmatif untuk Wilayah 3T

Kebijakan afirmatif merupakan pendekatan kebijakan publik yang dirancang untuk memberikan dukungan khusus kepada kelompok atau wilayah yang mengalami ketertinggalan struktural. Tujuan utama dari kebijakan afirmatif adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks pembangunan pendidikan di Indonesia, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sering menjadi sasaran kebijakan afirmatif karena menghadapi berbagai keterbatasan, seperti akses transportasi, keterbatasan infrastruktur, serta keterbatasan sumber daya pendukung pendidikan.

Penerapan kebijakan afirmatif dalam penganggaran pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah pemberian alokasi anggaran yang lebih besar atau penambahan faktor koreksi dalam formula distribusi anggaran untuk wilayah yang memiliki tingkat kesulitan geografis lebih tinggi. Dengan demikian, kebijakan afirmatif dapat membantu menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil dan proporsional.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori tersebut, kajian ini menggunakan kerangka konseptual yang menempatkan mekanisme alokasi anggaran pendidikan sebagai faktor utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi transformasi digital pada SMTK di wilayah 3T.

Dalam kerangka konseptual ini, keterbatasan infrastruktur digital pada satuan pendidikan dipengaruhi oleh desain kebijakan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah. Oleh karena itu, penerapan pendekatan needs-based budgeting, yang didukung oleh prinsip keadilan distributif dan kebijakan afirmatif wilayah, menjadi dasar dalam merumuskan alternatif kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan wilayah 3T.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan publik untuk mengkaji permasalahan alokasi anggaran sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung transformasi digital pada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Provinsi Maluku.

Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini berfokus pada pemahaman terhadap desain kebijakan, mekanisme distribusi anggaran, serta implikasinya terhadap kesiapan

infrastruktur digital pada satuan pendidikan. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen kebijakan, regulasi, laporan kelembagaan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan penganggaran pendidikan dan transformasi digital dalam sektor pendidikan keagamaan.

Sumber data dalam kajian ini diperoleh melalui studi dokumen, yang meliputi regulasi pemerintah terkait penganggaran pendidikan, dokumen kebijakan pendidikan keagamaan, laporan program bantuan sarana dan prasarana pendidikan, serta berbagai literatur akademik yang relevan dengan analisis kebijakan publik dan penganggaran berbasis kebutuhan wilayah.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi permasalahan kebijakan yang berkaitan dengan alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada SMTK di wilayah 3T. Kedua, analisis akar masalah menggunakan pendekatan pohon masalah untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dari permasalahan yang terjadi. Ketiga, penentuan prioritas masalah menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth (USG)* untuk menentukan fokus analisis kebijakan. Keempat, perumusan alternatif kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan geografis wilayah dengan menggunakan kerangka teori keadilan distributif, *needs-based budgeting*, dan kebijakan afirmatif wilayah.

Melalui tahapan analisis tersebut, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih proporsional dan responsif terhadap karakteristik geografis wilayah dalam mendukung implementasi transformasi digital pada SMTK di Provinsi Maluku.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap kondisi penyelenggaraan pendidikan SMTK di wilayah 3T Provinsi Maluku serta membahas implikasi kebijakan alokasi anggaran sarana dan prasarana pendidikan terhadap efektivitas implementasi transformasi digital.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Maluku masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Kondisi geografis wilayah Maluku yang didominasi oleh wilayah kepulauan menyebabkan akses terhadap fasilitas pendidikan menjadi tidak merata, terutama bagi satuan pendidikan yang berada di daerah terpencil.

Tabel 2. Data Peserta Didik dan Guru Satuan Pendidikan Bimas Kristen di Provinsi Maluku

No	Nama Sekolah Per Kabupaten/Kota	Data Siswa			Data Guru
		Lk	Pr	Total	Jumlah
1	SDTK Suli - Maluku Tengah	37	45	82	14
2	SMPTK Waipia – Maluku Tengah	18	7	25	16
3	SMPTK Suli – Maluku Tengah	23	15	38	13
4	SMPTK Patti – Tiakur Maluku Barat Daya	35	38	73	15
5	SMPTK Yafila – Maluku Tengah	29	39	68	17
6	SMPTK Kadesi Seira – Maluku Tenggara	54	38	92	10
7	SMPTK Hukuanakotta	29	21	50	17
8	SMPTK Manusa	11	9	20	11

9	SMPTK Regoha	17	13	30	6
10	SMTK Ambon	12	15	27	13
11	SMTK Sola Gratia – Kab. Kep. Tanimbar	27	28	55	18
12	SMTK – Tunas Harapan Arma	12	21	33	14
13	SMAK Yamtel – Maluku Tenggara	13	11	24	14
14	SMAK Rambatu	24	36	60	21

Sumber: Data Pendidikan Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku (2025)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah peserta didik pada SMTK di wilayah 3T Provinsi Maluku masih relatif terbatas dengan jumlah tenaga pendidik yang juga masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan SMTK di wilayah kepulauan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Berdasarkan data pendidikan SMTK di wilayah Maluku, jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan teologi Kristen masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan tenaga pendidik serta fasilitas pembelajaran yang memadai. Beberapa satuan pendidikan masih mengalami keterbatasan sarana pembelajaran seperti perangkat teknologi pendidikan, ruang belajar, serta fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada beberapa SMTK di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut digunakan untuk pengadaan berbagai fasilitas pembelajaran seperti laptop, proyektor (infocus), meja guru, dan lemari penyimpanan yang mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Meskipun bantuan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pendidikan SMTK, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai keterbatasan, antara lain keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang menerima bantuan serta besaran anggaran yang relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan sarana pendidikan secara keseluruhan.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan terhadap program bantuan sarana dan prasarana pendidikan SMTK di wilayah 3T dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kriteria evaluasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn, yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan politik.

Dari aspek efektivitas, program bantuan sarana dan prasarana pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan fasilitas pembelajaran di beberapa satuan pendidikan SMTK yang menerima bantuan. Fasilitas seperti perangkat laptop dan proyektor dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan meningkatkan kualitas penyampaian materi pembelajaran.

Dari aspek efisiensi, penggunaan anggaran bantuan sarana dan prasarana relatif telah dimanfaatkan secara optimal oleh satuan pendidikan penerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran yang mendesak. Namun demikian, keterbatasan jumlah anggaran yang tersedia menyebabkan bantuan yang diberikan belum mampu menjangkau seluruh satuan pendidikan SMTK yang membutuhkan.

Dari aspek kecukupan dan pemerataan, program bantuan sarana dan prasarana masih menghadapi tantangan dalam hal distribusi bantuan yang merata, khususnya bagi

satuan pendidikan yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan. Kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan proses distribusi bantuan memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa program bantuan sarana dan prasarana pendidikan SMTK merupakan kebijakan yang penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di wilayah 3T, namun masih memerlukan penguatan dari sisi perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, serta strategi implementasi yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. *Pertama*, kajian ini menggunakan data yang terbatas pada beberapa satuan pendidikan SMTK di wilayah Provinsi Maluku sehingga hasil analisis belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi seluruh SMTK di wilayah Indonesia. *Kedua*, kajian ini lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan bantuan sarana dan prasarana pendidikan tanpa melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan SMTK, seperti kualitas tenaga pendidik, kurikulum, serta dukungan masyarakat. *Ketiga*, keterbatasan ketersediaan data yang bersifat komprehensif terkait kondisi sarana dan prasarana pendidikan SMTK di wilayah 3T juga menjadi salah satu kendala dalam melakukan analisis yang lebih mendalam.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan analisis kebijakan pendidikan keagamaan, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kajian ini menyoroti secara khusus hubungan antara desain mekanisme alokasi anggaran dengan kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung implementasi transformasi digital pendidikan.

Kebaruan dari kajian ini terletak pada penggunaan pendekatan analisis kebijakan yang mengintegrasikan perspektif keadilan distributif, needs-based budgeting, dan kebijakan afirmatif wilayah dalam menganalisis mekanisme alokasi anggaran pendidikan keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan kebijakan yang muncul akibat penggunaan formula alokasi anggaran yang bersifat seragam secara nasional.

Selain itu, kajian ini juga memberikan kontribusi empiris melalui penggunaan data kelembagaan pendidikan keagamaan di Provinsi Maluku untuk menggambarkan kondisi riil dukungan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan SMTK di wilayah kepulauan.

Kajian ini juga memberikan kontribusi konseptual dengan menawarkan kerangka analisis alokasi anggaran pendidikan berbasis karakteristik geografis wilayah sebagai pendekatan alternatif dalam perumusan kebijakan pendidikan di wilayah kepulauan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi kebijakan yang ada, tetapi juga menawarkan arah perbaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan wilayah 3T.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Provinsi Maluku, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi transformasi digital melalui penguatan alokasi anggaran sarana dan prasarana pendidikan.

Alternatif Kebijakan 1: Mempertahankan Mekanisme Alokasi Anggaran yang Berlaku

Alternatif kebijakan pertama adalah mempertahankan mekanisme alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang saat ini berlaku secara nasional. Dalam mekanisme ini, distribusi bantuan kepada satuan pendidikan dilakukan berdasarkan formula yang relatif seragam tanpa mempertimbangkan faktor koreksi geografis secara khusus.

Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal kemudahan implementasi karena tidak memerlukan perubahan signifikan dalam sistem penganggaran yang telah berjalan. Selain itu, mekanisme yang seragam dapat mempermudah proses administrasi serta menjaga konsistensi distribusi bantuan antar satuan pendidikan.

Namun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan antarwilayah, khususnya bagi wilayah dengan karakteristik geografis yang lebih kompleks seperti wilayah kepulauan. Akibatnya, bantuan yang diterima oleh satuan pendidikan di wilayah 3T belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil dalam mendukung pengembangan infrastruktur digital.

Alternatif Kebijakan 2: Peningkatan Alokasi Anggaran Sarana dan Prasarana Digital

Alternatif kebijakan kedua adalah meningkatkan besaran alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang secara khusus diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur digital pada satuan pendidikan di wilayah 3T.

Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memberikan dukungan tambahan berupa peningkatan anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi informasi, pengembangan jaringan internet, serta fasilitas digital lainnya yang diperlukan dalam mendukung implementasi transformasi digital pendidikan.

Kelebihan dari pendekatan ini adalah dapat secara langsung meningkatkan kapasitas infrastruktur digital pada satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan fasilitas teknologi. Namun demikian, peningkatan anggaran semata tidak selalu mampu menyelesaikan permasalahan apabila mekanisme distribusi anggaran masih menggunakan pendekatan yang seragam secara nasional.

Alternatif Kebijakan 3: Reformulasi Mekanisme Alokasi Anggaran Berbasis Kebutuhan Geografis

Alternatif kebijakan ketiga adalah melakukan reformulasi mekanisme alokasi anggaran sarana dan prasarana pendidikan dengan mengintegrasikan pendekatan *needs-based budgeting* yang mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah.

Dalam pendekatan ini, formula alokasi anggaran dilengkapi dengan parameter pembobotan geografis yang mencerminkan tingkat kesulitan wilayah, biaya logistik, serta kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah. Dengan demikian, distribusi anggaran dapat menjadi lebih proporsional dan responsif terhadap kebutuhan riil satuan pendidikan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam kebijakan publik yang menekankan bahwa distribusi sumber daya perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kebutuhan antarwilayah agar kebijakan yang diterapkan dapat menghasilkan manfaat yang lebih adil dan efektif.

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria William N. Dunn

Untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan alokasi anggaran sarana dan prasarana pendidikan pada SMTK di wilayah 3T Provinsi Maluku, dilakukan analisis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Kriteria tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan politik.

Melalui pendekatan ini, setiap alternatif kebijakan dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, dengan mempertimbangkan aspek keberhasilan implementasi, efisiensi penggunaan sumber daya, tingkat pemerataan manfaat kebijakan, serta kemungkinan dukungan politik terhadap kebijakan yang diusulkan.

Tabel 3. Skoring Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria William N. Dunn

Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Kelayakan Politik	Total
Alternatif 1: Mempertahankan mekanisme alokasi anggaran yang berlaku	2	3	2	2	2	3	14
Alternatif 2: Peningkatan dukungan anggaran infrastruktur digital	3	3	3	3	3	3	18
Alternatif 3: Reformulasi alokasi anggaran berbasis kebutuhan geografis	4	3	4	4	4	3	22

Berdasarkan hasil skoring alternatif kebijakan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, alternatif kebijakan berupa reformulasi mekanisme alokasi anggaran

berbasis kebutuhan geografis wilayah memperoleh nilai tertinggi dibandingkan alternatif kebijakan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dinilai paling efektif dalam mengatasi kesenjangan dukungan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah 3T, karena mampu mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah, tingkat kesulitan distribusi logistik, serta kebutuhan riil satuan pendidikan. Dengan demikian, reformulasi mekanisme alokasi anggaran berbasis kebutuhan geografis dapat menjadi alternatif kebijakan yang paling relevan untuk mendukung implementasi transformasi digital pada SMTK di Provinsi Maluku.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi transformasi digital pada SMTK di wilayah 3T Provinsi Maluku masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait ketersediaan infrastruktur digital dan mekanisme alokasi anggaran yang belum berbasis kebutuhan geografis wilayah. Kondisi geografis wilayah kepulauan serta keterbatasan akses infrastruktur menjadi faktor yang mempengaruhi kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan sistem digital dalam tata kelola pendidikan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme alokasi anggaran bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang masih menggunakan pendekatan seragam secara nasional belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil satuan pendidikan di wilayah 3T. Kondisi ini menyebabkan distribusi bantuan pendidikan belum sepenuhnya proporsional dan berdampak pada keterbatasan dukungan infrastruktur digital pada SMTK di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis alternatif kebijakan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, reformulasi mekanisme alokasi anggaran berbasis kebutuhan geografis wilayah merupakan alternatif kebijakan yang paling relevan dalam mengatasi kesenjangan dukungan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah 3T. Pendekatan ini memungkinkan distribusi anggaran yang lebih responsif terhadap kondisi geografis wilayah serta kebutuhan nyata satuan pendidikan.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya memperkuat implementasi transformasi digital pada SMTK di wilayah 3T Provinsi Maluku antara lain sebagai berikut:

1. Reformulasi mekanisme alokasi anggaran pendidikan dengan mengintegrasikan parameter pembobotan geografis dalam formula distribusi bantuan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga alokasi anggaran dapat lebih mencerminkan kebutuhan riil wilayah kepulauan.
2. Peningkatan dukungan anggaran untuk pengembangan infrastruktur digital pendidikan, khususnya bagi satuan pendidikan SMTK di wilayah 3T yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas teknologi pembelajaran.
3. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan serta distribusi bantuan sarana dan prasarana pendidikan agar pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak satuan pendidikan di wilayah terpencil.

4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi program bantuan pendidikan, guna memastikan bahwa bantuan sarana dan prasarana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di SMTK.

REFERENSI

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Data Pendidikan Bimas Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Maluku. (2025).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Transformasi Digital Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pengelolaan Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Ditjen Bimas Kristen.
- Laporan Bantuan Sarana dan Prasarana SMTK Tahun Anggaran 2025. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku.
- OECD. (2020). *Digital Transformation in Education: Policy and Practice*. Paris: OECD Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms?* Paris: UNESCO.
- World Bank. (2019). *World Development Report: Learning to Realize Education's Promise*. Washington DC: World Bank.